



ISSN : 2087-0736

Jurnal Scientific Management

- 1 Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap Kinerja Anggota DPRD Dalam Pengawasan APBD dengan partisipasi Masyarakat dan Budaya Politik Sebagai Permoderasi (Studi Pada Provinsi Maluku Utara)
- 2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Pendanaan dan Dividen Pada Perusahaan Berpotensi Tumbuh Tinggi dan Rendah (Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia)
- 3 Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif Dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara)
- 4 Kajian Tentang Budaya Organisasi dan Pemogokan Pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Sam Ratulangi Manado
- 5 Pengaruh Konflik Antar Pribadi Dan Work Family Conflict Terhadap Stres Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Jakarta)
- 6 Pengaruh Iklan, Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat, Penjualan Pribadi, dan Pemasaran Langsung terhadap Niat Beli Konsumen di Maluku Utara
- 7 Pengaruh Faktor Produksi dan Pemasaran terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Kecil Manufaktur

Jurnal
Scientific Management
Volume 1, Nomor 1, April 2010

Pimpinan Redaksi
Abdullah W. Jabid, SE, MM

Wakil Pemred
Hartati Hadadi, SE, M.Si

Redaktur Ahli
Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, M.Si
Dr. Abdul Hadi Sirat, SE, M.Si
Dr. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK
Dr. Nahu Daud, SE, M.Si
Dr. Muamil Sunan, SE, M.AP
Dr. Marwan, SE, M.Si

Dewan Pakar (Mitra Bestari)
Prof. Dr. Oesman Lewangka, MA -----(Universitas Hasanuddin Makassar)
Prof. Dr. H. Salim Basalama -----(Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Prof. Dr. H. M. Syafi'i Idrus, SE, M.Ec -----(Universitas Brawijaya Malang)
Prof. Dr. Widodo -----(Universitas Airlangga Surabaya)
Prof. Dr. H. Mansur Ramly -----(Kepala Balitbang Depdiknas)

Redaktur Pelaksana
Suwito, SE, M.Si

Sekretaris Redaksi
Marwan Man Soleman, SE, M.Si

Keuangan
Yetty, SE, ME
Nurlaila, SE, M.Si

Sirkulasi
Zulkifli, SE, M.Si
Muksin Bailusy, SE, M.Si
Muhammad Rachmat, SE, M.Si

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:
Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Jl. Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan Telp : 0921- 3121854
Kode Pos 97719

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan ilmu manajemen. Tulisan yang disampaikan ke redaksi harus asli (bukan plagiat) merupakan hasil penelitian disertai acuan sebagaimana tulisan ilmiah, dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain.

Daftar Isi

Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan APBD dengan Partisipasi Masyarakat dan Budaya Politik Sebagai Permoderasi (<i>Studi Pada Provinsi Maluku Utara</i>).....	1 - 12
Herman Darwis	
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Pendanaan dan Dividen Pada Perusahaan Berpotensi Tumbuh Tinggi dan Rendah (<i>Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia</i>)	13 - 31
Mila Fatmawati	
Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah Daerah (<i>Survey pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara</i>)	32 - 51
Suwito	
Kajian Tentang Budaya Organisasi dan Pemogokan Pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Sam Ratulangi Manado	52 - 63
Rahmat Sabuhari	
Pengaruh Konflik Antar Pribadi dan <i>Work Family Conflict</i> Terhadap Stres Kerja dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja (<i>Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Jakarta</i>)	64 - 83
Adnan Rajak	
Pengaruh Iklan, Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat, Penjualan Pribadi, dan Pemasaran Langsung terhadap Niat Beli Konsumen di Maluku Utara	84 - 99
Abdul Rahman Jannang	
Pengaruh Faktor Produksi dan Pemasaran terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Kecil Manufaktur	100 -118
Abdul Hadi Sirat	

**PENGARUH KOMPETENSI PANITIA ANGGARAN DPRD,
KOMPETENSI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PENGANGGARAN PARTISIPATIF DAN
IMPLIKASINYA PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(SURVEY PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
MALUKU UTARA)**

Suwito

Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate
Jl. Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan Telp : 0921- 3121854
Kode Pos 97719

Abstract: *The objective of this research is to investigate the impact of the competence of Budget Committee DPRD, the competence of Budget Team local government on the partisipative budgeting and its implication at local government performance.*

The methods employed are descriptive and explanatory survey on 8 Local Government in north moluccas. Data collection is conducted using surveying techniques with questionnaire and interview. The research was conducted from March 2007 until August 2007. Analysis method used is Path Analysis.

Conclusion drawn are 1) The Competence of the Budget Committee DPRD and The Competence of The Budget Team Local Government simultaneously effect the Partisipative Budgeting. 2) The Competence of the Budget Committee DPRD partially very strong effect Partisipative Budgeting. 3) The Competence of The Budget Team Local Govern partially weak effect Partisipative Budgeting. 4) The Competence of the Budget Committee DPRD, The Competence of The Budget Team Local Government and Partisipative Budgeting simultaneously effect Local Government Performance. The third variable, Partisipative Budgeting variable so very strong effect local government performance with direct effect contribution to 65 percent, and then followed with the Competence of the Budget Committee DPRD variable 2,70 percent and The Competence of The Budget Team Local Government 0,15 percent.

Key words: *the competence of budget committee dprd, the competence of budget team local governme, partisipative budgeting, local government performance, path analysis.*

Keberadaan otonomi daerah seperti dinyatakan dalam UU No 32/2004 pasal 22 ayat (b) adalah “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”. Untuk mencapainya saat

ini pemerintah daerah diperhadapkan pada tekanan untuk lebih mempertimbangkan efektivitas, mempertimbangkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta mempertimbangkan

dampak kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan urusan-urusan publik. Kenyataan inilah yang membuat akuntansi sektor publik menjadi disiplin ilmu yang dibutuhkan keberadaannya di lingkungan pemerintahan daerah saat ini.

Memahami akuntansi sebagai alat pengendali perlu dibedakan, akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organization control*). Akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan terkait dengan informasi peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya menjamin bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Sedangkan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi, terkait dengan informasi yang lebih luas mengenai organisasi yaitu menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.

Untuk tujuan tersebut, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. (UU No.32/2004, pasal 23 ayat 1 dan 2). Sebagaimana Mardiasmo (2002:99), mengatakan bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang

bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang, (Mardiasmo, 2002:182-184). Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi, (Kenis, 1979:707).

Mengingat anggaran dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait fungsinya sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi dan stabilisasi, maka sangat dibutuhkan peran baik anggota DPRD (Legislatif) maupun aparat pemerintah daerah (Eksekutif) yang memiliki kompetensi dalam proses penyusunan fiskal, proses anggaran, dan sampai pada penyelenggaraan akuntansi disektor publik. Karena bagaimanapun, unsur manusia dalam proses ini memegang kunci keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks inilah pimpinan legislatif maupun eksekutif dituntut menjadi pengarah dalam mendayagunakan dan meningkatkan hubungan orang dengan organisasi, menciptakan iklim yang kondusif untuk memotivari orang-orang bekerja sama secara harmonis, sehingga tujuan dapat dicapai.

Teori umum (*grand theory*) yang melandasi kerangka pemikiran ini adalah

commander theory yang dikemukakan oleh Lois Goldberg (1965) yang dikutip oleh Harahap (2004:70) bahwa teori ini menitik beratkan pada para pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan dalam mengontrol sumber daya atau *resource*, dalam hal ini pemegang kekuasaan adalah pemerintah. Penegasan teori ini adalah pada pengelola atau *Stewardship* yang menerima amanah mengelola sumber daya untuk kepentingan publik memerlukan suatu media untuk mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja. Media dimaksud selama ini dikenal dengan laporan keuangan.

Teori antara (*middle theory*) adalah teori keagenan (*agency theory*) dari Jensen, Mackling (1976) teori ini menegaskan bahwa antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) terdapat hubungan kontrak. Inti dari teori ini adalah bahwa setiap orang atau kelompok cenderung mementingkan diri atau kelompoknya sendiri untuk memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang dibuat dalam menjalankan amanah mengelola sumber daya untuk kepentingan publik. Menurut Moe (1984:739) hubungan keagenan dalam intitusi pemerintah daerah adalah hubungan kontrak antara Pemerintah Daerah-Rakyat, Pemerintah Daerah-DPRD, Pegawai/Pejabat Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah.

Menurut para ahli bahwa *agency theory* beranggapan kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan membagi (*shared*) wewenang, hak dan kewajiban diantara peranan pengawas/pemeriksa intern dan manajemen, sehingga para

eksekutif cenderung semakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri.

Dengan demikian jika principal dan agen memilih hubungan kepengurusan (*stewardship*), hasilnya adalah hubungan yang benar-benar penting yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok, demikian pula halnya pihak prinsipal memilih untuk menciptakan suatu situasi kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pelimpahan wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Teori Aplikasi (*application theory*) adalah Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) yang dikemukakan oleh UU No.32/2004, UU No. 17/2003 dan Mardiasmo (2002: 84). Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) ini berpandangan bahwa dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja. Dengan kata lain pemerintah diharuskan bertindak berdasarkan *coat minded* dan harus efisien serta mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

KONSEP KOMPETENSI

Hersey (1995:5) mengemukakan bahwa seorang manajer harus memiliki kemampuan tehnik (*technical skill*), kemampuan sosial (*social skill*) dan kemampuan konseptual (*conceptual skill*). Kemampuan tehnik adalah kemampuan atau keahlian untuk mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan, dan kemampuan untuk

memikirkan masalah dan mencari alternatif-alternatif penyelesaian. Kemampuan konseptual adalah kemampuan seorang manajer didalam menggunakan logika dalam menganalisa masalah, melihat perbedaan situasi dan hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya, mempraktekan model yang pernah dipelajari, dan mengidentifikasi hubungan dalam data. Penelitian Virtanen, (2000:334) pada bidang pelayanan publik di Amerika pada tahun 2000 menunjukkan, bahwa bagi para manajer yang bergerak dibidang pelayanan publik, setidaknya ada lima jenis kompetensi yang harus mereka miliki yaitu : 1) kompetensi yang menyangkut bidang pekerjaannya; 2) kompetensi profesional berkaitan dengan bidang ilmunya; 3) kompetensi administratif; 4) kompetensi politik; dan 5) kompetensi etika.

Dalam penelitian ini untuk mengukur kompetensi menggunakan lima jenis kompetensi sebagaimana dikemukakan Virtanen (2000:334) yaitu: 1) Kompetensi yang menyangkut bidang pekerjaannya, 2) Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang ilmunya, 3) Kompetensi administratif, 4) Kompetensi politik, dan 5) Kompetensi etika

KOMPETENSI PANITIA ANGGARAN DPRD

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 19 bahwa salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi anggaran, Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, DPRD memerlukan alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang salah satunya adalah Panitia Anggaran yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang meliputi : 1). satu wakil dari setiap Komisi, dan utusan Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota, 2). Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota. 3). Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.

Panitia Anggaran Legislatif mempunyai tugas: 1). memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2). memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna; 3). memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah; 4). memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; dan 5). menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

KOMPETENSI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah (PKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. (PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006)

Lebih lanjut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 dalam pasal 100 ayat 1,2 dan 3 dinyatakan bahwa : Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD melakukan penyempurnaan. Berdasarkan hasil penyempurnaan tersebut TAPD menyusun rancangan peraturan daerah tentang

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

PENGANGGARAN PARTISIPATIF

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (*role setting*) dalam usaha pencapaian sasaran anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran anggaran dengan sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut.

Dengan demikian partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan. Lebih lanjut, Becker *et al*, (1978:404) mengemukakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating manajers* dalam memutuskan bersama komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan yang akan datang selanjutnya akan ditempuh oleh *operating manajers* dalam pencapaian sasaran anggaran. Tingkat partisipasi *operating manajers* dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif para manajer. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, dan ditentukan oleh seberapa besar seseorang tersebut melibatkan dirinya sebagai bagian dari perusahaan atau organisasi.

Partisipasi seluruh tingkat manajemen, mulai pada proses penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaan anggaran akan membawa pengaruh positif dalam pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu proses

penyusunan anggaran harus melibatkan seluruh tingkatan manajemen sejak persiapan, penyusunan anggaran dan perencanaan sasaran yang ingin dicapai serta rencana biaya untuk pelaksanaannya.

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam menilai kinerja organisasi biasanya membedakan penilaian kinerja atas kinerja organisasi dan kinerja individual manajer yang memimpin organisasi tersebut, yang keduanya dapat menggunakan kriteria keuangan dan non keuangan.

Pengukuran kinerja individual manajer dari aspek keuangan biasanya dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Sedangkan pengukuran kinerja individual manajer dari aspek non keuangan menurut para ahli dapat dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial meliputi : perencanaan (*Planing*), pemeriksaan (*investigating*), pengkoordinasian (*coordinating*), penilaian (*evaluating*), pengawasan (*superfising*), pemilihan staf (*staffing*), negosiasi (*negotiating*) dan perwakilan (*representative*). Menurut Indiantoro (1993) dan Supomo (1998) dalam Ratnawati (2004) kinerja dikatakan efektif apabila tujuan anggaran tercapai dan bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran serta memotivasi bawahan mengidentifikasi dan melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran, menerima kesepakatan anggaran, dan melaksanakannya sehingga dapat menghindarkan dampak negatif anggaran yaitu faktor kriteria kinerja,

sistem penghargaan (*reward*) dan konflik.

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja kepala daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dinyatakan dalam pasal 18 yaitu pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan dasar yaitu Bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, dan kependudukan.

Penelitian terdahulu tentang kompetensi dikemukakan Nunuy Nur Afiah (2005: 17) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Penganggaran. Sedangkan penelitian terdahulu tentang penganggaran dikemukakan oleh Islahuzzaman, (2005: 274) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial baik secara parsial maupun simultan artinya penganggaran partisipatif mampu mendorong pencapaian kinerja manajerial. Berbeda dengan pernyataan Islahuzzaman, dalam hasil penelitian Darwanis dinyatakan bahwa anggaran partisipatif tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja manajerial. Ini berarti menunjukkan bahwa anggaran partisipatif tidak mampu memotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini lebih disebabkan karena, sebagian besar manajer berpartisipasi dalam penyusunan anggaran tidak

sampai pada keputusan final, Darwanis, (2005: 200)

PENGUJIAN HIPOTESIS

Tujuan yang ingin dicapai pada pengujian hipotesis ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh dari Variabel eksogen baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara. Jenis statistik yang digunakan untuk mencapai kedua tujuan tersebut adalah analisis jalur, berikut hasil pengolahan data yang diperoleh menggunakan software LISREL 8.30.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- H1:** Kompetensi anggota DPRD, dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah, berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Penganggaran Partisipatif.
- H2:** Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif, berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

KORELASI ANTAR VARIABEL

Korelasi antar variabel merupakan dasar perhitungan dalam analisis jalur, dimana sebelum melangkah ke analisis jalur terlebih dahulu dihitung koefisien korelasi antar variabel untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

Berikut ini disajikan koefisien korelasi antara ketiga Variabel eksogen

[Kompetensi Panitia Anggaran DPRD (X₁), Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (X₂) dan Penganggaran Partisipatif (Y)] dengan variabel endogen [Kinerja pemerintah daerah (Z)]

Tabel 1. Koefisien Korelasi Antar Variabel

Korelasi	X ₁	X ₂	Y	Z
X ₁	1,0000	0,1849	0,6867	0,7252
X ₂		1,0000	0,6482	0,5920
Y			1,0000	0,9444
Z				1,0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2007

Dari tabel matriks korelasi di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga Variabel eksogen semuanya memiliki hubungan yang positif dengan Variabel endogen kinerja pemerintah daerah pada kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. hubungan diantara ketiga Variabel eksogen juga menunjukkan hubungan yang positif.

Dilihat dari angka korelasinya hubungan antara Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dengan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah masuk dalam kategori rendah dengan nilai korelasi antara 0,20 hingga 0,399. Sementara hubungan antara Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Penganggaran Partisipatif masuk dalam kategori kuat dengan nilai korelasi antara 0,60 hingga 0,799

Pengujian Hipotesis Pertama

Sebelum menguji pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terlebih dahulu diuji pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif yang merupakan sub struktur pertama dari paradigma penelitian.

KOEFISIEN JALUR

Untuk menguji pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif terlebih dahulu dicari koefisien jalur. Dari hasil pengolahan data ketiga variabel diperoleh koefisien jalur variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan variabel Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap penganggaran partisipatif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

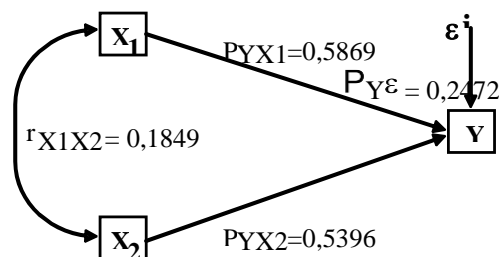
Tabel 2. Koefisien Jalur Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terhadap Penganggaran Partisipatif

Variabel eksogen	Koefisien Jalur	t-hitung	R ²
Kompetensi Panitia Anggaran DPRD (X ₁)	0,5869	2,5940	0,7528
Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (X ₂)	0,5396	2,3850	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2007

Dari nilai koefisien jalur dapat dilihat bahwa diantara kedua Variabel eksogen, yaitu variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD memberikan kontribusi langsung yang lebih besar terhadap Penganggaran partisipatif pada kabupaten yang ada di Provinsi Maluku

Utara. Diagram jalur hubungan struktural kedua Variabel eksogen (Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terhadap Penganggaran Partisipatif pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Jalur Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPR (X₁) dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah(X₂) terhadap Penganggaran Partisipatif(Y).

Koefisien Determinasi

Setelah koefisien jalur diperoleh, selanjutnya dihitung besar pengaruh kedua Variabel eksogen secara bersama-sama terhadap penganggaran partisipatif, yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi kedua Variabel eksogen terhadap Penganggaran Partisipatif pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

Tabel 3. Besar Pengaruh Variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD (X₁) dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (X₂) Secara Bersama-sama dan Parsial terhadap Penganggaran Partisipatif (Y)

Variabel eksogen	Besar Pengaruh		
	Langsung	Tidak Langsung	Total
X ₁	34,44%	5,86%	40,30%
X ₂	29,12%	5,86%	34,98%

Koefisien Determinasi $(R^2_{Y.X_1,X_2}) =$	75,28%
Pengaruh Faktor Lain (Epsilon) $=$	24,72%

Sumber: Dihitung dari Gambar 1

Dari koefisien determinasi diketahui bahwa besar pengaruh kedua Variabel eksogen secara bersama-sama terhadap penganggaran partisipatif pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara adalah sebesar 75,28%. Jadi dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa 75,28% Penganggaran Partisipatif pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara bersama-sama, sementara sisanya sebesar 24,72% dijelaskan oleh faktor/variabel lain diluar kedua Variabel eksogen tersebut.

Uji Pengaruh Bersama-sama

Setelah dihitung besar pengaruh kedua Variabel eksogen (Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah) secara bersama-sama terhadap penganggaran partisipatif, selanjutnya diuji apakah secara bersama-sama pengaruh kedua Variabel eksogen tersebut signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara menggunakan statistik uji F dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{YX_i} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{Kompetensi Panitia} \\ \text{Anggaran DPRD dan} \\ \text{Kompetensi Tim Anggaran} \\ \text{Pemerintah Daerah secara} \\ \text{bersama-sama tidak} \\ \text{berpengaruh signifikan} \end{array}$$

$i = 1,2$

terhadap Penganggaran Partisipatif.
 $H_a : \rho_{YX_i} \neq 0$
 $i = 1,2$ Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif.

Dari nilai koefisien determinasi pada tabel 4.29 dapat dicari nilai F_{hitung}

$$F_{hitung} = \frac{(8 - 2 - 1) \times 0.7528}{2 \times (1 - 0.7528)} = 7.6133$$

menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1) \times R^2_{Y.X_1,X_2}}{k \times (1 - R^2_{Y.X_1,X_2})}$$

Uji Pengaruh Parsial

Setelah prosedur pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari kedua Variabel eksogen secara bersama-sama terhadap Penganggaran Partisipatif, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk menguji pengaruh masing-masing dari kedua Variabel eksogen tersebut terhadap Penganggaran Partisipatif. Untuk menguji pengaruh parsial masing-masing Variabel eksogen digunakan statistik uji t yang dibandingkan dengan nilai t dari tabel pada *level of significant* $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas 5 pada pengujian dua arah yaitu sebesar 2,5706.

Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD terhadap Penganggaran Partisipatif

Hipotesis

$$H_0 : \rho_{YX_i} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{Kompetensi Panitia Anggaran} \\ \text{DPRD dan Kompetensi Tim} \\ \text{Anggaran Pemerintah Daerah} \\ \text{secara bersama-sama tidak} \end{array}$$

$i = 1,2$

berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif.
 $H_a : \rho_{YX_i} \neq 0$ Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif.
 $i = 1,2$

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} koefisien jalur variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD terhadap Penganggaran Partisipatif adalah sebesar 2,5940. Karena t_{hitung} (2,5940) lebih besar dari t_{tabel} (2,5760) maka pada *level of significant* $\alpha = 5\%$ H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Panitia Anggaran DPRD secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif.

Tabel 4. Besar Pengaruh Variabel Kompetensi panitia anggaran DPRD terhadap Penganggaran partisipatif

Pengaruh Variabel Kompetensi panitia anggaran DPRD Terhadap Penganggaran partisipatif	Besar Pengaruh
Secara Langsung	= 34.44%
Tidak Langsung	= 5.86%
Total Pengaruh	= 40.30%

Secara langsung variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD memberikan pengaruh sebesar 34.44% terhadap penganggaran partisipatif dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah daerah sebesar 5.86%. Dengan demikian total pengaruh variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD terhadap Penganggaran Partisipatif sebesar 40.30%.

Kompetensi Panitia Anggaran DPRD berpengaruh positif terhadap Penganggaran Partisipatif, artinya kabupaten yang Kompetensi Panitia Anggaran DPRD nya tinggi pada umumnya memiliki Penganggaran Partisipatif yang lebih baik.

Pengaruh Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terhadap Penganggaran Partisipatif

Hipotesis

$H_0 : \rho_{YX_2} = 0$ Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif .
 $H_a : \rho_{YX_2} \neq 0$ Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} koefisien jalur variabel Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif adalah sebesar 2,3850. Karena t_{hitung} (2,3850) lebih kecil dari t_{tabel} (2,5760) maka pada *level of significant* $\alpha = 5\%$, H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kompetensi tim anggaran pemerintah daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penganggaran partisipatif. Akan tetapi pada tingkat kepercayaan 90% masih dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif.

Tidak signifikannya pengaruh Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif, hal ini lebih disebabkan

secara umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara belum melibatkan seluruh menejer publik seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penganggaran daerah.

Tabel 5. Besar Pengaruh Variabel Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran partisipatif

Pengaruh Kompetensi tim anggaran pemerintah daerah Terhadap Penganggaran partisipatif	Besar Pengaruh
Secara Langsung	= 29.12%
Tidak Langsung	= 5.86%
Total Pengaruh	= 34.98%

Sumber: Tabel 3

Kompetensi tim anggaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penganggaran partisipatif, artinya kabupaten yang kompetensi tim anggaran pemerintah daerahnya tinggi pada umumnya memiliki Penganggaran Partisipatif yang lebih baik.

Pengujian Hipotesis Kedua

Pada sub struktur pertama telah diuji pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif. Pada bagian ini akan diuji pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan sub struktur kedua dari paradigma penelitian.

Koefisien Jalur

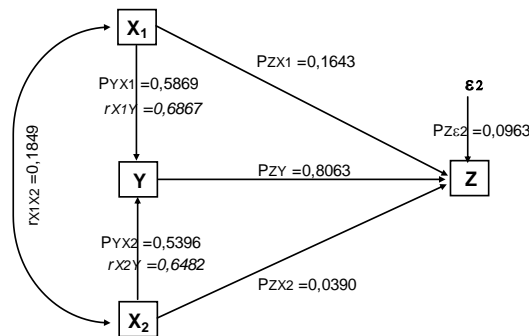
Untuk menguji pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terlebih dahulu dicari koefisien jalur. Dari hasil pengolahan data keempat variabel diperoleh koefisien jalur variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, variabel Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 6. Koefisien Jalur Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tm Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel eksogen	Koefisien Jalur	t- hitung	R ²
Kompetensi Panitia Anggaran DPRD (X ₁)	0,1643	0,7594	0,9037
Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (X ₂)	0,0390	0,1887	
Penganggaran Partisipatif (Y)	0,8063	2,8885	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2007

Berdasarkan nilai koefisien jalur dapat dilihat bahwa diantara ketiga Variabel eksogen, variabel Penganggaran Partisipatif memberikan kontribusi langsung yang paling besar terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Diagram jalur hubungan struktural ketiga Variabel eksogen (Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Jalur Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD (X₁), Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (X₂) dan Penganggaran Partisipatif (Y) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Z).

Keterangan :

X₁ = Kompetensi Panitia Anggaran DPRD

X₂ = Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Y = Penganggaran Partisipatif

ε₁ = Faktor lain di luar X₁, X₂ dan Y yang berpengaruh terhadap Z.

p = Koefisien jalur

Koefisien Determinasi

Setelah koefisien jalur diperoleh, selanjutnya dihitung besar pengaruh ketiga Variabel eksogen secara bersama-sama terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi ketiga Variabel eksogen terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 7. Besar Pengaruh Variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD (X₁), Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (X₂) dan Penganggaran Partisipatif (Y) Secara Bersama-sama dan Parsial terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Z)

Variabel eksogen	Besar Pengaruh		
	Langsung	Tidak Langsung	Total
X ₁	2,70%	9,21%	11,91%
X ₂	0,15%	2,16%	2,31%
Y	65,01%	11,14%	76,15%

Koefisien Determinasi (R ² _{Z,X1,X2,Y}) =	90,37%
Pengaruh Faktor Lain (Epsilon) =	9,63%

Sumber: Dihitung dari Gambar 2

Dari koefisien determinasi diketahui bahwa besar pengaruh ketiga Variabel eksogen secara bersama-sama terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 90,37%. Jadi dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa 90,37% pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif secara bersama-sama, sementara sisanya sebesar 9,63% dijelaskan oleh faktor/variabel lain diluar ketiga Variabel eksogen tersebut.

Uji Pengaruh Bersama-Sama

Setelah dihitung besar pengaruh ketiga Variabel eksogen (Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya diuji apakah secara bersama-sama pengaruh ketiga Variabel eksogen tersebut signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah menggunakan statistik uji F dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : ρ_{ZX_iY} = 0
i = 1,2

Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan

Ha : $\rho_{ZX_iY} \neq 0$
 $i = 1,2$

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
 Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Dari nilai koefisien determinasi pada tabel 4.33 dapat dicari nilai F_{hitung} menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1) \times R_{Z.X_1, X_2, Y}^2}{k \times (1 - R_{Z.X_1, X_2, Y}^2)}$$

$$F_{hitung} = \frac{(8 - 3 - 1) \times 0.9037}{3 \times (1 - 0.9037)} = 12.5123$$

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,5123, dari tabel F pada *level of significant* $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas (3;4) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 6,5914.

Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka pada *level of significant* $\alpha = 5\%$, H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak, jadi berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Uji Pengaruh Parsial

Setelah prosedur pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari ketiga Variabel eksogen secara bersama-

sama terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk menguji kebermaknaan pengaruh masing-masing dari ketiga Variabel eksogen tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten yang ada di provinsi Maluku Utara. Untuk menguji pengaruh parsial masing-masing Variabel eksogen digunakan statistik uji t yang dibandingkan dengan nilai t dari tabel pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 4 pada pengujian dua arah yaitu sebesar 2,7764.

Pengaruh Kompetensi Panitia Anggaran DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis

$H_0 : \rho_{ZX_1} = 0$ Kompetensi Panitia Anggaran DPRD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_a : \rho_{ZX_1} \neq 0$ Kompetensi Panitia Anggaran DPRD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} koefisien jalur variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,7594. Karena t_{hitung} (0,7594) lebih kecil dari t_{tabel} (2,7764) maka pada *level of significant* $\alpha = 5\%$, H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Panitia Anggaran DPRD secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini lebih disebabkan karena

tingginya tingkat perbedaan dalam proses penetapan anggaran daerah antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD hal ini menyebabkan tidak jarang terjadi distorsi dalam penetapan anggaran daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 8. Besar Pengaruh Variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Besar Pengaruh
Secara Langsung	= 2.70%
Tidak Langsung	= 9.21%
Total Pengaruh	= 11.91%

Secara langsung variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD memberikan pengaruh sebesar 2.70% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif sebesar 9.21%. Total pengaruh variabel Kompetensi Panitia Anggaran DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 11.91%.

Pengaruh Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis

Ho : $\rho ZX_2 = 0$ Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Ha : $\rho ZX_2 \neq 0$ Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} koefisien jalur variabel Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,1887. Karena t_{hitung} (0,1887) lebih kecil dari t_{tabel} (2,7764) maka pada *level of significant* $\alpha = 5\%$, H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kompetensi tim anggaran pemerintah daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan tidak signifikannya pengaruh Panitia Anggaran DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. tidak signifikannya pengaruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, lebih disebabkan karena tingginya tingkat perbedaan dalam proses penetapan anggaran daerah antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD hal ini menyebabkan tidak jarang terjadi distorsi dalam penetapan anggaran daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 9. Besar Pengaruh Variabel Kompetensi Tim anggaran PEMDA terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Variabel Kompetensi tim anggaran PEMDA Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Besar Pengaruh
Secara Langsung	= 0.15%
Tidak Langsung	= 2.16%
Total Pengaruh	= 2.31%

Sumber: Tabel 7

Kemudian secara langsung variabel kompetensi tim anggaran

pemerintah daerah memberikan pengaruh sebesar 0.15% terhadap kinerja pemerintah daerah dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan penganggaran partisipatif sebesar 2.16%. Secara total pengaruh variabel Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 2.31%.

Hipotesis

- Ho : $\rho_{ZY} = 0$ Penganggaran Partisipatif secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Ha : $\rho_{ZY} \neq 0$ Penganggaran Partisipatif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} koefisien jalur variabel penganggaran partisipatif terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 2,8885. Karena t_{hitung} (2,8885) lebih besar dari t_{tabel} (2,7764) maka pada *level of significant* $\alpha = 5\%$, H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Penganggaran Partisipatif secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

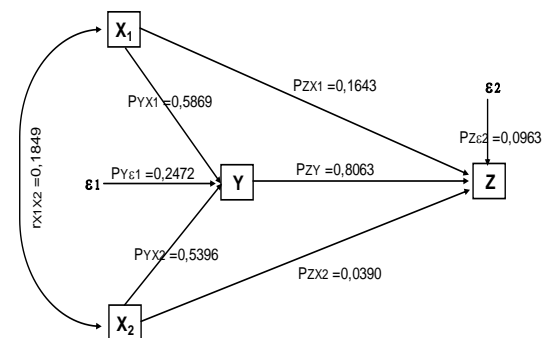
Penganggaran Partisipatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya kabupaten yang Penganggaran Partisipatifnya tinggi pada umumnya memiliki Kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Tabel 10. Besar Pengaruh Variabel Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Variabel Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Besar Pengaruh
Secara Langsung	= 65.01%
	= 11.14%
Total Pengaruh	= 76.15%

Secara langsung variabel Penganggaran Partisipatif memberikan pengaruh sebesar 65.01% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar 11.14%. Total pengaruh variabel Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada sebesar 76.15%.

Diagram jalur gabungan dari hubungan sub struktur pertama dan sub struktur kedua dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Diagram Jalur Gabungan

Sub Struktur Pertama dan Kedua.

Keterangan:

- X_1 = Kompetensi Panitia Anggaran DPRD
- X_2 = Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Y = Penganggaran Partisipatif
- ϵ_1 = faktor-faktor lain di luar X_1 , dan X_2 yang berpengaruh terhadap Y .
- ϵ_2 = faktor-faktor lain di luar X_1 , X_2 dan Y yang berpengaruh terhadap Z .
- p = Koefisien jalur

KESIMPULAN

Setelah melewati proses pengelolaan dan analisis data dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1) Kompetensi Panitia Anggaran DPRD dan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara simultan memiliki berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif. Dari kedua variabel tersebut, Kompetensi Panitia Anggaran DPRD memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penganggaran partisipatif. Sedangkan Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pengaruhnya sangat lemah. Dengan demikian Kompetensi Panitia Anggaran DPRD punya peran yang menentukan dalam suksesnya penganggaran partisipatif. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Kompetensi Panitia Anggaran DPRD yang berkualitas akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran, distribusi anggaran dan peran stabilisasi dalam perekonomian daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi pemborosan sumber daya daerah. 2) Kompetensi Panitia Anggaran DPRD secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penganggaran Partisipatif artinya Kabupaten yang

Kompetensi Panitia Anggaran DPRD nya tinggi pada umumnya memiliki Penganggaran Partisipatif yang lebih baik. Sehingga Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Maluku Utara, perlu banyak menaruh perhatian untuk pengembangan Kompetensi Panitia Anggaran DPRD di bidang anggaran. Karena jika kualitas Kompetensi Panitia Anggaran DPRD baik, maka akan dapat mendukung terhadap proses anggaran daerah dalam hal alokasi dan distribusi anggaran yang efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup dan catatan sipil. 3) Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penganggaran partisipatif. Tidak signifikannya pengaruh Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penganggaran Partisipatif, disebabkan karena dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara belum melibatkan seluruh menejer publik seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penganggaran daerah. 4) Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Penganggaran Partisipatif secara simultan memiliki berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Diantara ketiga variabel, Penganggaran Partisipatif memberikan kontribusi langsung yang paling besar terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan Kompetensi Panitia Anggaran DPRD, Kompetensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pengaruhnya sangat lemah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Penganggaran Partisipatif

punya peran yang menentukan dalam suksesnya Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Penganggaran Partisipatif yang baik akan meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab para manajer publik untuk menyukseskan pencapaian tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup dan catatan sipil. 5) Kompetensi Panitia Anggaran DPRD secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat perbedaan pemikiran dalam proses penetapan anggaran daerah antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD yang menyebabkan tidak jarang terjadi distorsi dalam penetapan anggaran daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. 6) Kompetensi tim anggaran pemerintah daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan tidak signifikannya pengaruh Panitia Anggaran DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yaitu lebih disebabkan karena tingginya tingkat perbedaan dalam proses penetapan anggaran daerah antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD yang menyebabkan tidak jarang terjadi distorsi dalam penetapan anggaran daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. 7) Penganggaran Partisipatif secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penganggaran Partisipatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya Kabupaten yang Penganggaran Partisipatifnya tinggi pada umumnya memiliki Kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Becker, H.S & D., Green, 1978., *Budgeting and Employee Behavior, The Journal of Business*, October p.392-402.
- Darwanis, 2005, *Analisis Kausalitas antara budaya perusahaan, Anggaran Partisipatif, Senjangan Anggaran, Kinerja Manajer dan Kinerja Perusahaan*. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- E.Ristandi Suhardjadinata, 2006. *Pengaruh Peran Pimpinan Pemerintah Daerah dan Jasa Pemeriksa Internal dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Dampaknya Kepada Kinerja Kepala Daerah*. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hersey Paul, Blanchard, 1995. *Manajemen Prilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. Terjemahan. Edisi Keempat. Erlangga, Jakarta.

- Indra Bastian, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFY-Yogyakarta.
- Indra Bastian, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Islahuzzaman, 2005. Hubungan antara Penganggaran Partisipatif, Komitmen Organisasi, Motivasi dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban, serta Implikasinya terhadap Kinerja Manajer. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Jensen, Michael and William Meckling, 1979. Theory of Firms, Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3
- Kenis, I. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, Vol. LIV.No.4 p.707-721.
- Mahoney, T. A., T.H Jerdee and S.J Carroll., 1963. *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati, Ohio:Southwestern Publishing Co.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. ANDI Yogyakarta.
- Moh. Nazir. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- M. Sudradjat Sw. 2002. *Metode Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Diktat Kuliah.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nunuy Nur Afiah, 2004. *Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik*, Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung
- Ratnawati Kurnia, 2004. *Pengaruh Budgeting Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya paternalistik dan komitmen organisasi sebagai moderating variabel. (Studi empiris pada perguruan tinggi swasta kopertis wilayah III)*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar. p.647-658
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik IndonesiaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik IndonesiaRepublik Indonesia, Peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005 Tentang *Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah*.
- Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
- Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43/KEP/2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan structural Pegawai Negeri Sipil
- Sofyan Shafry Harahap, 2001. *Teory Akuntansi*, Edisi Revisi, Cet 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Spencer, lyle M., JR, & Signe M. Pencer 1993. *Competence at work, model for superior performance*. John Willey & Inc.
- Virtanen, Turo, 2000. Changing Competences of Publik Manager: Tensions in Commitment, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 13, No. 4, p. 333-3